

TINDAKAN KOLEKTIF AKTIVIS KAMPUNG MISKIN KOTA DALAM PERENCANAAN DESAIN KAMPUNG SUSUN BAHARI AKUARIUM, PENJARINGAN JAKARTA UTARA

Deni Hardiawan Putra

Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia Gedung C Kampung FISIP UI Depok, 16424
denihardiawan11@gmail.com

Diterima: 28-07-2021 Direview : 11-08-2021 Direvisi : 16-08-2021 Disetujui: 28-08-2021

ABSTRAK. Penelitian ini menganalisis tindakan kolektif Aktivistis Kampung Miskin Kota dalam perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium menggunakan teori *Strategic Action Fields* (SAFs). Tindakan kolektif Aktivistis Kampung Miskin Kota telah dibentuk sejak penggusuran Kampung Akuarium. Mereka membuat rancangan desain kampung susun sebagai kampanye anti penggusuran. Tindakan kolektif tersebut membuat Aktivistis Kampung Miskin Kota memiliki posisi tawar dalam kebijakan perumahan rakyat yang berhubungan dengan kampung miskin kota. Beragam tindakan kolektif mereka lakukan selama periode kontestasi sosial pasca penggusuran salah satunya perencanaan desain pembangunan kembali Kampung Akuarium. Setelah proses kontestasi sosial selesai tindakan kolektif Aktivistis Kampung Miskin Kota mengalami perubahan. Peneliti ingin mendalami perubahan tersebut dengan melakukan penelitian studi kasus. Peneliti melakukan proses pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi penelitian selama bulan Februari hingga April 2021. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur jurnal-jurnal penelitian, dokumentasi foto dan mengikuti *webinar* yang membahas Kampung Akuarium. Penelitian ini menemukan tindakan kolektif Aktivistis Kampung Miskin Kota berkembang seiring keterlibatan mereka dalam perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium. Tindakan kolektif yang dibentuk Aktivistis Kampung Miskin Kota dengan Pemprov DKI Jakarta menghasilkan ide baru tentang Kampung Susun (*vertical house*) sebagai model hunian baru yang selaras dengan peraturan tata ruang wilayah dan aspek sosial-budaya yang sudah terbentuk sejak lama.

Kata Kunci: Tindakan Kolektif, Aktivistis Kampung Miskin Kota, Perencanaan Desain, Kampung Susun Bahari Akuarium

ABSTRACT. *This study analyzes the collective action of the Urban Poor Activist in planning the design of the Kampung Susun Bahari Akuarium using the Strategic Action Fields (SAFs) theory. The collaborative action of the Urban Poor Activist has been formed since the eviction of Kampung Akuarium. They drafted the design of the flats as an anti-eviction campaign. This collective action has made the Urban Poor Activist have a bargaining position in public housing policies related to urban poor villages. They took various collective actions during the post-eviction period of social contestation, one of which was the planning for the redevelopment of the Akuarium Village. After the social contestation process was completed, the collective actions of the Urban Poor Activist changed. Researchers want to explore these changes by conducting case study research. Researchers conducted the primary data collection process through interviews and research observations from February to April 2021. Meanwhile, secondary data collection was carried out by studying literature in research journals, photo documentation, and attending webinars discussing Akuarium Village. This study found that the collective action of the Urban Poor Activists developed along with their involvement in the design planning of the Kampung Susun Bahari Aquarium. The collaborative action formed by the Urban Poor Activist with the DKI Jakarta Provincial Government resulted in a new idea of Kampung Susun (vertical house) as a new residential model. It is in line with regional spatial planning regulations and socio-cultural aspects that have been formed for a long time.*

Keywords: Collaborative ction, Urban Poor Activist, Design Planning, Kampung Susun Bahari Akuarium

PENDAHULUAN

Perumahan kumuh adalah masalah pembangunan sosial di negara berkembang. Perkembangan perumahan kumuh di negara berkembang disebabkan oleh kemiskinan dan urbanisasi yang semakin cepat ke wilayah perkotaan (Gonzales, 2008).

Perumahan kumuh diartikan sebagai sekumpulan hunian yang tidak memenuhi kelayakan bangunan karena dibangun tanpa perencanaan, memiliki infrastruktur fisik yang rendah (seperti minimnya air bersih, sanitasi, sirkulasi udara di depan rumah, dan tempat pembuangan sampah) dan rawan

kebencanaan (seperti banjir dan kebakaran) (Texier, 2008; Kusno, 2015). Perkembangan perumahan kumuh beberapa kota besar di Indonesia salah satunya Jakarta dipengaruhi lonjakan arus urbanisasi tiap tahunnya tanpa disertai dengan penyediaan perumahan murah (Blackburn, 2011; Colombijn, 2011; Kurniawan et al., 2020; Rukmana, 2018).

Urbanisasi kependudukan di Indonesia diikuti pula dengan urbanisasi kemiskinan yang berdampak pada timbulnya berbagai aspek persoalan perkotaan seperti aspek fisik (berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi) dan aspek nonfisik seperti kondisi sosial-ekonomi (keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan, ketidakadilan), ataupun aspek ekologis (banjir dan pencemaran lingkungan) (Prio Sambodo, Rizki Fillaili, 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik terdapat 445 Rukun Warga (RW) kumuh di DKI Jakarta pada tahun 2017 dengan rincian 15 RW kumuh dengan kategori berat, 99 RW kumuh dengan kategori sedang, 205 RW dengan kategori kumuh ringan, dan 126 RW dengan kategori kumuh sangat ringan (Kusnandar, 2019). Sementara menurut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), 49 persen wilayah DKI Jakarta adalah permukiman kumuh dengan rincian 118 dari 267 kelurahan tergolong kumuh (Haq, 2019).

Menanggapi persoalan tersebut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerbitkan sejumlah kebijakan sosial untuk mencegah dan menanggapi perumahan kumuh baik pada level nasional (seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum) maupun pada level daerah (seperti, program Muhammad Husni Thamrin (MHT), program kampung deret, dan program *community action plan* (CAP) yang baru-baru ini sedang berjalan).

Beberapa kebijakan sosial yang dibentuk sebelum program CAP masih memiliki kekurangan antara lain: (1) kebijakan hanya fokus pada perbaikan lingkungan fisik saja; (2) kebijakan hanya masuk pada perumahan yang berdiri di atas tanah legal sehingga belum menyentuh perumahan ilegal di Jakarta; (3) kebijakan belum mampu mengatasi permasalahan mendasar dari keberadaan perumahan kumuh di kota Jakarta yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial atas akses perumahan (Rukmana, 2018; Irawaty, 2018)

Penelitian ini membatasi fokus analisis pada program *community action plan* (CAP) yang sedang dijalankan oleh Aktivistis Kampung Miskin Kota bersama Pemprov DKI Jakarta di Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara. Savirani & Aspinall (2017) menemukan Aktivistis Kampung Miskin Kota diberikan kesempatan untuk memasukan kepentingan mereka terkait hak atas tanah dan hunian di Kampung Akuarium. Mereka dapat pula mengambil manfaat dalam program CAP seperti mengetahui dokumen perencanaan tata ruang dan zonasi dengan terlibat dalam rencana pembangunan kembali Kampung Akuarium.

Pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium mengadopsi gagasan *Innovative Self-Sustaining Living Kampong* yaitu suatu pendekatan desain yang memicu kreatifitas pengguna untuk berkontribusi dan berperan dalam lingkungan tempat tinggalnya. Gagasan tersebut dianggap dapat menjawab masalah hunian dan lingkungan di Kampung Akuarium karena solusi dan penerapannya berasal dari kebutuhan masyarakat itu sendiri (Afiat, 2020).

Perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium sebagai *strategic action fields* (SAFs) merupakan ruang interaksi sosial antara Aktivistis Kampung Miskin Kota dengan Pemprov DKI Jakarta. Peneliti tertarik menganalisa fenomena tersebut dengan melakukan penelitian studi kasus.

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui kerja lapangan selama bulan Februari hingga April 2021 di Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara. Penelitian ini ingin mengetahui (1) bagaimana tindakan kolektif Aktivistis Kampung Miskin Kota dalam perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium? (2) Mengapa desain Kampung Susun Bahari Akuarium muncul sebagai inovasi sosial perumahan rakyat di DKI Jakarta?

TEORI STRATEGIC ACTION FIELDS

Menurut Fligstein dan McAdam (2011), *strategi action fields* (SAFs) adalah struktur dasar yang membentuk bangunan kehidupan organisasi dan politik modern di bidang ekonomi, masyarakat sipil dan negara. Teori SAFs memiliki keunggulan dalam menganalisis peran aktor-aktor sosial dalam memproduksi, memelihara dan mengurai struktur sosial dalam bentuk tatanan sosial level meso. Aktor-aktor sosial dalam SAFs terdiri dari *incumbents*, *challengers*, dan *governance unit*.

Incumbent adalah aktor-aktor sosial dengan kekuasaan besar yang mendominasi *field*, *challengers* adalah aktor-aktor sosial dengan kekuasaan kecil yang ingin merubah *field*, dan *governance unit* adalah aktor-aktor sosial yang memelihara fungsi sistem sosial di dalam *field*. Tiga aktor sosial tersebut saling memahami tindakan masing-masing untuk menyusun strategi dan pergerakan di dalam *field*.

Proses aktor-aktor sosial saling memahami tindakan aktor lain disebut *social skill*. *Social skill* terdiri dari tiga aspek yaitu kognitif, empatik, dan komunikatif. Aktor-aktor sosial harus menguasai tiga aspek tersebut untuk meningkatkan posisi mereka, mengambil alih kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan di dalam *field* (Fligstein, 2001). Selain, aktor-aktor sosial dituntut untuk menguasai *social skill*, mereka harus memahami pula lingkungan sosial yang lebih luas (*the broader field environment*) sebagai tempat *field* tertambat.

Pemahaman aktor-aktor sosial terhadap lingkungan sosial yang lebih luas dapat membantu mereka mengidentifikasi perubahan sosial dalam *field* yang datangnya dari pengaruh eksternal. Perubahan dalam *field* terdekat dapat mengguncang kestabilan SAFs (*exogenous shocks*) sehingga masing-masing aktor sosial harus melakukan tindakan kolektif untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang akan terjadi.

Selama proses tindakan kolektif kolektif *incumbent* dan *challengers* memiliki kepentingan berbeda yang membuat pengaturan arena menjadi terpecah. Perpecahan di dalam pengaturan arena ini mengawali pertentangan diantara dua kelompok (*the onset of contention*), dimana masing-masing pihak akan membangun tindakan kolektif atau memanfaatkan sumber daya organisasi untuk memenangkan pertarungan di dalam arena (Fligstein & McAdam, 2012).

Pertentangan sosial yang terus berlanjut antara *incumbent* dengan *challenger* menyebabkan situasi ketidakpastian/krisis (*episodes of contention*). Situasi tersebut memaksa *incumbent* dan *challengers* melakukan *framing* atas tindakan kelompok lain demi menghasilkan tindakan inovatif dan tindakan kolektif di dalam arena. Tindakan kolektif di dalam arena menandai akhir dari situasi krisis dan pertentangan di dalam arena (*Settlement*). Masing-masing kelompok sosial akan menerima perspektif baru yang telah disepakati dan mulai mengidentifikasi alternatif

tindakan dalam pengaturan *field* yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami tindakan kolektif aktivis miskin kota dalam perencanaan desain kampung susun bahari akuarium. Perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium merupakan permasalahan sosial yang unik karena mengedepankan prinsip *bottom up* dalam perencanaan desain kampung, dimana cara-cara ini belum optimal diterapkan dalam program MHT Plus dan Kampung Deret.

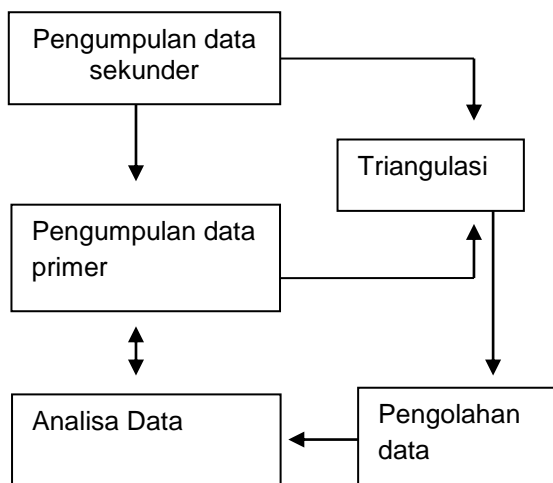
Peneliti berusaha menjelaskan fenomena tersebut menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus dilakukan dengan mengeksplorasi fenomena sosial tertentu dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data secara terperinci dan mendalam yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumen dan laporan deskripsi kasus (Creswell, 2018). Proses eksplorasi terhadap perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium bersumber dari wawancara dengan Aktivistis Kampung Miskin Kota, studi literatur dan mengikuti webinar Kampung Akuarium

Informan yang berhasil peneliti wawancarai antara lain: (1) Kepala Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai *incumbent*, (2) Aktivistis Kampung Miskin Kota (warga Kampung Akuarium, Rujak Center For Urban Studies dan Jaringan Rakyat Miskin Kota) sebagai *challengers*.

Peneliti juga melakukan observasi di Kampung Akuarium selama bulan Februari 2021 hingga April 2021. Observasi penelitian difokuskan untuk membangun kedekatan dengan subjek yang diteliti. Disamping itu, peneliti mengamati pula proses pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium sebagai wujud implementasi dari desain yang telah dibuat selama tahap PRACAP hingga CAP. Peneliti menambahkan beberapa data sekunder dari *website* dan *channel youtube* Rujak Center For Urban Studies untuk menganalisis *broader environment* yang memengaruhi perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium sebagai SAFs dan program perumahan rakyat sebagai *field*.

Setelah data-data penelitian terkumpul, peneliti menuliskan transkrip wawancara dan mengetik

catatan lapangan. Data transkrip kemudian di *coding* berdasarkan tema permasalahan sosial yang akan dianalisis seperti proses perencanaan desain kampung susun dan perubahan desain kampung susun. Peneliti melakukan pemeriksaan kembali informasi yang disampaikan informan dengan cara mencocokkan informasi yang bersumber dari satu informan dengan informasi dari informan lain sehingga informasi menjadi *valid* terlebih dahulu sebelum benar-benar dianalisis.



Gambar 1. Alur Penelitian

PEMBAHASAN

Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara

Kampung Akuarium memiliki luas lahan 10.130 m² yang berada di tepi laut Jawa (Gambar 2). Batas-batas wilayah Kampung Akuarium yaitu: sisi utara berbatasan dengan Teluk Jakarta dan laut Jawa, sisi barat berbatasan dengan Kampung Luar Batang, sisi timur berbatasan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa, sisi selatan berbatasan dengan Pasar Hexagon dan Pasar Ikan. Sisi Utara dan Timur yang berhadapan dengan laut telah ditutupi tembok sebelum pengusuran tahun 2016. Sementara sisi barat dan selatan dibiarkan terbuka karena menjadi akses jalan masyarakat menuju Kampung Luar Batang dan Pasar Ikan.

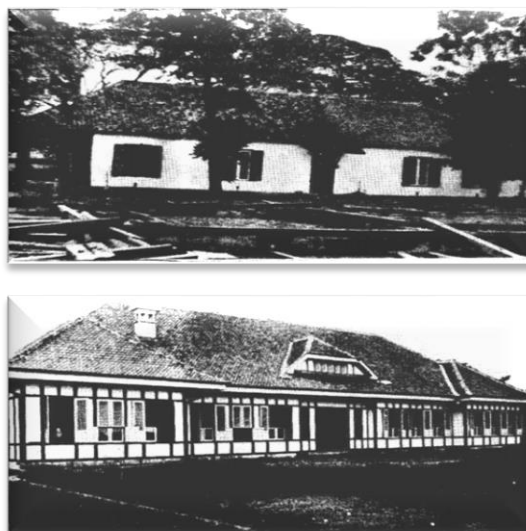
Lahan Kampung Akuarium memiliki catatan sejarah di wilayah pesisir Jakarta Utara. Pada masa kolonial Belanda, lahan kampung akuarium digunakan sebagai Laboratorium Perikanan Batavia (*Visscherij Station te Batavia*) yang merupakan salah satu cabang kegiatan penelitian Museum Zoologi Bogor (Gambar 3). Laboratorium ini dibangun pada September 1904 hingga Desember 1905 atas prakarsa DR. J.C. Koningsberger seorang ahli

zoologi sekaligus Kepala Museum Zoologi Bogor.



Gambar 2. Lokasi Kampung Akuarium
Sumber: (wikimapia.org)

Pada tahun 1922, bangunan laboratorium lama yang semi permanen dibangun kembali menjadi lebih permanen dan diberi nama *Laboratorium voor het Onderzoek der Zee* (LOZ) (Gambar 3). Pada tahun 1923, LOZ membuka pameran resmi berbagai jenis ikan di akuarium besar dan taman botani kecil (*hortus botanicus*) yang dinamai Taman Sitinjau Laut.



Gambar 3. *Visscherij Station Te Batavia* (atas);
Laboratorium Voor Het Onderzoek Der (bawah)
Sumber: (Soegiarto, 1987)

Pada 27 Desember 1949, LOZ resmi berganti nama menjadi Laboratorium Penyelidikan Laut (LPL). LPL tetap mengadakan pameran akuarium dan Taman Sitinjau Laut sebagai sarana edukasi kepada masyarakat yang berkunjung. Sampai tahun 1960, wilayah ini

dikenal masyarakat Jakarta dengan nama Akuarium, Pasar Ikan.

Pada tahun 1970, LPL bergabung ke dalam Lembaga Oseanografi Nasional (LON) di bawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LON LIPI selanjutnya berkembang pesat dengan penambahan jumlah staf peneliti maupun karyawan. Gedung lama LON LIPI dirasa tidak memadai lagi untuk menampung karyawan yang semakin bertambah sehingga LON LIPI dipindahkan dari jalan Akuarium, Pasar Ikan ke jalan Pasir Putih I, Ancol Timur pada 2 Juli 1977 (Soegiarto, 1987).

Selepas bangunan LON LIPI dipindahkan, lahan tersebut rencananya digunakan untuk perluasan kawasan Museum Bahari, namun rencana tersebut tak kunjung terealisasi hingga akhirnya masyarakat menggunakan lahan tersebut sebagai permukiman yang dinamakan Kampung Akuarium.

Pada tahun 1983, jumlah penghuni di Kampung Akuarium mulai bertambah akibat kebakaran di Kampung Luar Batang dan penggusuran di Kampung Bandan. Pertambahan penduduk ini terus berlangsung hingga tahun 2000-an hingga Kampung Akuarium menjadi permukiman padat penduduk yang dihuni 700 kepala keluarga baik pemilik bangunan maupun pengontrak.

Kini, warga Kampung Akuarium yang masih bertahan di shelter berjumlah 88 kepala keluarga atau 306 jiwa. Penduduk Kampung Akuarium berasal dari suku bangsa seperti Bugis, Sunda, Jawa, Makasar, dan sebagian kecil masyarakat lahir di Pasar Ikan atau Kampung Luar Batang sebagai generasi kedua. Mereka memiliki profesi beragam antara lain: nelayan, kuli pelabuhan Sunda Kelapa, kuli pelelangan ikan di Muara Baru/Muara Angke, pekerja pabrik, ibu rumah tangga yang membuka warung sembako, dsb. Aktivitas sosial warga Kampung Akuarium antara lain: bersekolah, bermain, mengobrol bersama tetangga (disebut pula nongkrong), rapat kampung, dan kerja bakti. Peneliti mengamati aktivitas mengobrol bersama tetangga rutin dilakukan warga pada pagi hari dan sore hari.

Tindakan kolektif Aktivistis Kampung Miskin Kota dalam Perencanaan Desain Kampung Susun Bahari Akuarium

Tindakan kolektif berupa perencanaan desain kampung susun dipengaruhi oleh fenomena penggusuran yang terjadi di Kampung

Akuarium. Penggusuran Kampung Akuarium bertujuan untuk merevitalisasi kawasan Sunda Kelapa. Kebijakan revitalisasi Sunda Kelapa sendiri telah diatur dalam Keputusan Gubernur No. 1766 tahun 2015 tentang penetapan kawasan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya.

Disamping itu, dalam Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi pasal 189 poin g menyatakan rencana penataan kawasan Kecamatan Penjarangan adalah pengembangan wisata sejarah di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa termasuk lahan yang digunakan di Kampung Akuarium. Penerapan aturan cagar budaya memengaruhi perubahan sosial di Kampung Akuarium.

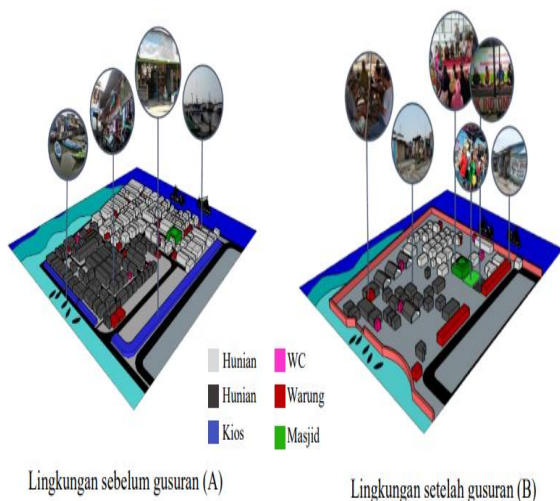
Sejumlah literatur penelitian telah membahas perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kampung kota Jakarta pasca penggusuran. Penggusuran mengakibatkan kerentanan sosial-ekonomi (Van Voorst & Hellman, 2015; Ika wati, 2017) karena hilangnya mata pencaharian dan hubungan sosial masyarakat di tempat lama (Betteridge & Webber, 2019). Penggusuran dianggap hanya memindahkan kepadatan penduduk perkotaan ke wilayah pinggiran kota (UN Habitat, 2003) yang menyebabkan gentrifikasi penduduk miskin kota dari tengah kota (Kusno, 2012; Domaradzka & Wijkström, 2019).

Dalam penggusuran kampung akuarium perubahan sosial yang dirasakan masyarakat adalah kesulitan ekonomi dan trauma psikologis yang dialami anak-anak dan perempuan (Rizzo, 2018). Mereka menyaksikan proses penggusuran dengan pengerahan aparat keamanan berjumlah 4.218 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP (Republika.co.id, 2016).

Setelah proses penggusuran dilakukan, ada sebagian masyarakat Kampung Akuarium yang bertahan di lokasi penggusuran. Mereka membangun bedeng-bedeng semi permanen atau menempati tenda pengungsian di atas puing-puing bekas penggusuran (Gambar 4). Mereka bertahan untuk mengembalikan kampung (Iqbal & Vonika, 2019; Sutanudjaja et al., 2019; Tauchid et al., 2015).

Tindakan tersebut merupakan bentuk dari *strategic action fields* (SAFs). Perjuangan mengembalikan kampung dilakukan dengan mencari dukungan pihak eksternal (seperti LSM, akademisi, media massa, dan politikus), bertahan di lokasi penggusuran, dan melakukan aksi demonstrasi untuk memprotes

tindakan pengusuran Kampung Akuarium. Cara-cara tersebut merupakan *social skill* yang dilakukan warga Kampung Akuarium untuk bertahan dalam situasi ketidakpastian pasca pengusuran.



Lingkungan sebelum gusuran (A)

Lingkungan setelah gusuran (B)

Gambar 4. Perbandingan Lingkungan Kampung Akuarium

Sumber: (Yustiara, 2018)

Seiring berjalannya waktu, *social skill* mereka semakin berkembang berkat interaksi sosial yang dibangun dengan pihak eksternal. Warga Kampung Akuarium dan LSM sepakat membuat gerakan sosial bernama Jaringan Kampung Miskin Kota. Pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut disebut sebagai Aktivistis Kampung Miskin Kota.

Aktivistis Kampung Miskin Kota memberikan peningkatan *social skill* kepada warga Kampung Akuarium diantaranya. Pertama, melatih kepemimpinan, organisasi dan memberikan *trauma healing* kepada warga Kampung Akuarium khususnya anak-anak dan ibu-ibu.

Kedua, memberikan pelatihan perencanaan desain (*soft advocacy*) dalam bentuk lomba membuat desain rumah impian. Lomba ini bertujuan untuk mengumpulkan materi-materi perencanaan atau desain pembangunan kembali Kampung Akuarium. Output dari kegiatan ini adalah maket desain kampung susun yang disampaikan melalui *press conference* ke media massa (Arsitek Rujak Center For Urban Studies, Wawancara Maret 2021) (Gambar 5).



Gambar 5. Desain awal hunian Kampung Akuarium

Sumber:

(<https://twitter.com/rujakrcus/status/1295192256954023936>, diakses 10 Juli 2021)

Terakhir, mendampingi warga mengajukan gugatan *class action* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan *class action* merupakan puncak konflik (*contentation*) antara warga Kampung Akuarium dengan Pemrov DKI Jakarta sebagai *incumbent*.

Setelah pergantian Gubernur DKI Jakarta di akhir tahun 2017, Aktivistis Kampung Miskin Kota mengusulkan rencana pembangunan kembali Kampung Akuarium. Mereka menganggap lokasi Kampung Akuarium tidak melanggar aturan tata ruang dan zonasi. Lokasi Kampung Akuarium dalam Peta Jakarta Satu berada di sub zona pemerintah daerah (P3) yang boleh dibangun rumah susun dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Sebelum melakukan rencana pembangunan, Pemrov DKI Jakarta melakukan kajian mendalam terkait peraturan-peraturan hukum yang ada di Kampung Akuarium. Selama menunggu proses tersebut, warga diizinkan menempati lahan Kampung Akuarium dan dibuatkan shelter sementara untuk menggantikan bedeng atau tenda-tenda pengungsian.

Aktivistis Kampung Miskin Kota membantu perencanaan desain *shelter* yang sesuai dengan kebutuhan warga Kampung Akuarium. Desain *shelter* dibuat mengelilingi lahan Kampung Akuarium dimana ada ruang kosong di tengah maupun sisi depan kampung yang menghadap ke Pasar Hexagon dan Jalan Pasar Ikan.

Desain ini bertujuan agar unit shelter memiliki sirkulasi udara dengan baik. Pembangunan shelter menghabiskan waktu selama 3 bulan

10 hari. Setelah shelter selesai dibangun, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur No. 878 tahun 2018 tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat melalui program *community action plan* (CAP).

Setelah KEPGUB itu diterbitkan, warga Kampung Akuarium mencabut gugatan *class action* yang menandai selesainya konflik (*settlement*) diantara kedua belah pihak. Dengan dicabutnya gugatan *class action* maka dimulainya kolaborasi sosial antara Pemprov DKI Jakarta dan warga Kampung Akuarium. Kolaborasi tersebut merubah *strategic action fields* dari perjuangan mengembalikan kampung menjadi perencanaan pembangunan Kampung Akuarium.

Sebelum perencanaan pembangunan Kampung Akuarium dimulai, LSM pendamping meningkatkan kapasitas (*social skill*) tim kerja dari masing-masing kampung miskin kota dengan melakukan: (1) pelatihan kepemimpinan seperti mengajarkan cara memfasilitasi dan memimpin rapat; (2) pelatihan mengenal status kepemilikan tanah seperti hak guna bangunan (HGB) dan hak pengelolaan (HPL); (3) pelatihan mengenal peta tata ruang dan zonasi warna dalam peta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Di sisi lain setelah KEPGUB No. 878 terbit, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan penataan permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah membuat aturan hukum yang menunjang rencana penataan permukiman kumuh sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Dari koordinasi tersebut maka terbitlah Peraturan Gubernur No. 90 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu yang menandai dimulainya penataan permukiman kumuh di DKI Jakarta salah satunya pembangunan kembali Kampung Akuarium dalam program *community action plan* (CAP).

Perencanaan desain Kampung Akuarium selama program *community action plan* adalah *strategic action fields* (SAFs) yang mempertemukan aktor-aktor sosial dengan kepentingan berbeda untuk berinteraksi di

dalam *field*. *Field* yang dimaksud disini adalah program perumahan rakyat (*housing field*). Aktor-aktor sosial dalam perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium antara lain: (1) Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) sebagai *incumbent* yang memiliki kekuasaan besar dalam menetapkan pembangunan perumahan di Kampung Akuarium; (2) Aktivistis Kampung Miskin Kota (warga Kampung Akuarium, Rujak Center For Urban Studies, Jaringan Rakyat Miskin Kota, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta) sebagai *challengers* yang memiliki kekuasaan kecil namun berusaha memengaruhi pembangunan perumahan di Kampung Akuarium; (3) konsultan sebagai *governance units* yang melaksanakan perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium. Selama menjalankan perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman menugaskan PT. Hardja Moekti sebagai konsultan perencana. Konsultan diminta mengumpulkan aspirasi warga Kampung Akuarium sebelum membuat *detail engineering design* (DED).

Sayangnya konsultan belum mampu memfasilitasi warga dalam perencanaan desain kampung susun secara intensif karena selama 4 bulan program CAP, konsultan hanya datang kunjungan selama 3 kali. Hal ini membuat hasil CAP belum sesuai harapan warga Kampung Akuarium, sebagaimana disampaikan oleh dua informan penelitian yaitu,

“Konsultan itu bekerja seperti mesin yang bergerak berdasarkan perintah. Dia hanya cari bahan dengerin di bawah nyatet segala macam, setor ke pemerintah. Tapi kalo pemerintah mau begini begitu ya sedikit memaksakan. Jadi bahasa kolaborasinya antara konsultan dan warga itu belum dapat. (Koordinator Wilayah Kampung Akuarium, Wawancara 27 Februari, 2021)”

“Cap yang di 2019 itu kita bisa anggap gagal si karena konsultan CAPnya itu jauh dari harapan warga karena mereka gak punya skill memfasilitasi. Selain itu DKI sendiri masih eksperimen soal CAP dan secara birokrasi mereka belum siap tapi sudah terlanjur diimplementasikan, akhirnya kembali lagi ke usulan perencanaan warga bareng pendampingnya masing-masing (Arsitek Rujak Center For Urban Studies, Wawancara Maret 2021)”

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa birokrasi Pemprov DKI Jakarta masih beradaptasi dalam pelaksanaan program CAP yang termasuk kebijakan baru perumahan rakyat. Hal ini mengakibatkan kolaborasi sosial antara Aktivis Kampung Miskin Kota dengan konsultan perencana masih belum optimal.

Kesenjangan peran yang dialami konsultan perencana melemahkan posisinya dalam perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium. Sebaliknya, Aktivis Kampung Miskin Kota mengambil peluang ini untuk meningkatkan posisi sosial mereka dalam perencanaan Desain Kampung Susun Bahari Akuarium.

Aktivis Kampung Miskin Kota mengusulkan desain perencanaan Kampung Akuarium selama tahap PRACAP disempurnakan menjadi *Detail Engineering Design* (DED) kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. DED sejatinya merupakan pertarungan bagi *incumbent* maupun *challengers* karena merepresentasikan kepentingan mereka dalam bangunan tersebut.

Setelah DED diserahkan seharusnya pembangunan Kampung Akuarium bisa dimulai pada awal tahun 2020, tetapi pembangunan harus diundur karena Provinsi DKI Jakarta sedang berada dalam situasi pandemi covid 19. Sebelum pembangunan dilakukan, desain Kampung Susun Bahari Akuarium harus mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran. Rekomendasi tersebut harus melalui kegiatan ekskavasi karena ada situs yang diduga bangunan cagar budaya yaitu Laboratorium Perikanan di masa Batavia.

Hasil penyelidikan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran mengakibatkan perubahan desain Kampung Susun Bahari Akuarium (*exogenous shock*). Mereka meminta massa atau blok-blok bangunan yang berada di atas area ekskavasi dihilangkan dari perencanaan karena tidak boleh ada bangunan di atas situs cagar budaya. Sehingga rencana jumlah bangunan kampung susun yang sebelumnya terdiri dari 7 tower dirubah menjadi 5 tower.

Desain Kampung Susun Bahari Akuarium sempat mengalami perubahan pula karena menyesuaikan Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua. Pergub ini mengatur kegiatan

pembangunan yang dilakukan di kawasan Kota Tua agar menaati Ketetapan Rancangan Kota (KRK), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan, dan Garis Sepadan Bangunan.

Setelah seluruh aturan telah disesuaikan dengan desain kampung susun bahari akuarium maka pada tanggal 17 Agustus 2020, Gubernur DKI Jakarta melakukan acara peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium.

Kampung Susun Bahari Akuarium sebagai Inovasi Perumahan Rakyat di DKI Jakarta

Desain Kampung Susun Bahari Akuarium memiliki dua kriteria yang bisa dikatakan sebagai inovasi perumahan rakyat di DKI Jakarta yaitu perencanaan dan pengelolaannya. Perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium berasal dari ide atau gagasan warga Kampung Akuarium dibantu oleh LSM dan Pemprov DKI Jakarta. Penamaan Kampung Susun Bahari Akuarium mengandung empat komponen penting yaitu (Sutanudjaja, 2020).

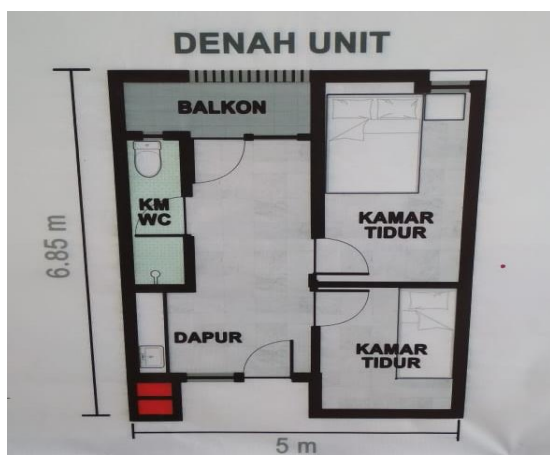
1. Kampung, merupakan bentuk perumahan rakyat yang mengedepankan aspek sosial dan gotong royong antar masyarakat.
2. Bentuk Susun, merupakan bentuk kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang terutama zona P3 (Pemerintah Daerah) adalah rumah susun dengan Koefisien Dasar Bangunan 50%, Koefisien Luas Bangunan 2, Ketinggian Bangunan 4.
3. Bahari merupakan bentuk kerikatan budaya masyarakat dengan laut
4. Akuarium merupakan lapisan sejarah tempat ini sebagai Pusat Penelitian Oseanografi dengan nama populer Aquarium

Desain Kampung Susun Bahari Akuarium dibentuk menyesuaikan perilaku dari *landed house* ke *vertical house*. Hal itu dilakukan agar tidak merubah perilaku warga Kampung Akuarium yang dulu, meskipun perilaku warga tidak akan sama seutuhnya karena objeknya telah berubah (Yustiara & Nirwansyah, 2018)

Masyarakat Kampung Akuarium berusaha mempertahankan ciri kampung dimana ruang interaksi sosial tetap dipertahankan di setiap blok-blok bangunan atau di luar bangunan. Ruang terbuka di blok bangunan ada di tengah-tengah unit hunian untuk tempat mengobrol antar tetangga. Sementara di luar

blok bangunan ada fasilitas umum yang mengakomodir interaksi sosial antar warga seperti mushola, taman bermain, balai warga, pasar, dan kebun sayur buah warga.

Unit hunian di Kampung Susun Bahari Akuarium memiliki luas 6.85 m x 5 m. Unit hunian itu terdiri dari 2 kamar tidur, sedikit ruang kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu, 1 kamar mandi yang dilengkapi wc, dapur dan balkon untuk menjemur pakaian. (Gambar 8).



Gambar 6. Denah Unit Hunian
Sumber: (Hasil Observasi, 2021)

Pembangunan Kampung Susun Akuarium dilaksanakan melalui kewajiban pengembang sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana (Media Jaya, 2020). Dengan dana SP3L membuka beragam opsi skema pengelolaan Kampung Susun Bahari Akuarium.

Pengelolaan Kampung Susun Bahari Akuarium masih dalam tahap perbincangan antara warga dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Warga Kampung Akuarium mengharapkan pengelolaan Kampung Susun Bahari Akuarium menggunakan skema koperasi. Mereka sendiri sudah memiliki koperasi yang bernama Kampung Akuarium Bangkit Mandiri. Koperasi ini sudah memiliki akta notaris dan perizinan sejak tahun 2019.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merespon usulan warga mengenai pengelolaan Kampung Susun Bahari Akuarium.

“Sebaiknya si gini jadi kalo tanah pemda, itu kan bangunannya pemda juga kan, nah

masyarakat itu bisanya menyewa rusun disitu ... nah menyewa itu nanti hubungannya antara penyewa dan pemilik bangunan dalam hal ini pemerintah daerah ... Kalo masyarakat ada pola seperti itu (pengelolaan koperasi) disesuaikan dulu dengan aturan, kalo aturannya gak sesuai dirubah dulu, bisa gak aturannya dirubah, kalo gak bisa dirubah ya gak bisa dilaksanakan (Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Wawancara Maret 2021)”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kampung Susun Bahari Akuarium merupakan model perumahan rakyat yang baru sehingga dalam tahapan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan masih perlu menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Kampung Susun Bahari Akuarium sebagai *pilot project* memberi pelajaran berharga bagi seluruh aktor sosial di dalamnya tentang pembangunan perumahan rakyat yang partisipatif dan mengedepankan dialog bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tindakan kolektif Aktivistis Kampung Miskin Kota dalam proses perencanaan Kampung Susun Bahari Akuarium meningkatkan *social skill* mereka dalam kebijakan perumahan rakyat. Tindakan kolektif Aktivistis Kampung Miskin Kota dibentuk oleh beberapa elemen penting *strategic action fields* (SAFs) antara lain:

- *Strategic action fields* (SAFs) sebagai ruang interaksi antar aktor sosial untuk melakukan perubahan dan stabilitas di dalam *field*. SAFs dalam kasus ini adalah perjuangan mengembalikan Kampung Susun Bahari Akuarium dan perencanaan desain Kampung Susun Bahari Akuarium.
- Perubahan dan stabilitas sosial dalam SAFs tersebut dipengaruhi oleh isu-isu sosial yang ada seperti penggusuran yang dilakukan pada tahun 2016 dan pembangunan kembali Kampung Akuarium.
- Perubahan sosial di dalam *field* karena penggusuran mengakibatkan perbedaan pandangan antara Pemprov DKI Jakarta dan Aktivistis Kampung Miskin Kota dalam pemanfaatan lahan Kampung Akuarium
- Penyelesaian konflik antara Pemprov DKI Jakarta dan Aktivistis Kampung Miskin Kota berakhir dengan disepakatinya rencana pembangunan kembali Kampung Akuarium.

- Setelah rencana pembangunan kembali Kampung Akuarium ditetapkan muncul ide baru berupa pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium.
- Inovasi pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium terletak pada proses perencanaan desain yang partisipatif dan rencana pengelolaan kampung susun menggunakan skema koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiat, M. (2020). "Resettlement" Kampung Akuarium Jakarta Utara Dengan Metode Kampung Berlapis dan Innovative Self-Sustaining Living. *Seminar Ilmiah Arsitektur 2020*, 8686, 566–574.
- Betteridge, B., & Webber, S. (2019). Everyday resilience, reworking, and resistance in North Jakarta's kampungs. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 2(4), 944–966.
<https://doi.org/10.1177/2514848619853985>
- Colombijn, F. (2011). *Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia, 1830-1960*. Leiden: KITLV Press.
- Creswell, J. W. & C. N. P. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Fourth Edit). Sage.
- Domaradzka, A., & Wijkström, F. (2019). Urban challengers weaving their networks: between the 'right to housing' and the 'right to the city.' *Housing Studies*, 34(10), 1612–1634.
<https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1657561>
- Fligstein, N. (2001). Social skill and the theory of fields. *Sociological Theory*, 19(2), 105–125.
<https://doi.org/10.1111/0735-2751.00132>
- Fligstein, N., & McAdam, D. (2011). Toward a General Theory of Strategic Action Fields. *Sociological Theory*, 29(1), 1–26.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01385.x>
- Fligstein, N., & McAdam, D. (2012). A Theory of Fields. In *A Theory of Fields*.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199859948.001.0001>
- Gonzales, C. (2008). Squatters, Pirates, and Entrepreneurs: Is Informality the Solution to the Urban Housing Crisis? *University of Miami Inter-American Law Review*, 239–259.
- Haq, M. F. U. (2019). Kementerian ATR Sebut Hampir 49 Persen Permukiman di DKI Kumuh. *Detik.Com*.
- Ika wati, N. et al. (2017). Penggusuran dan Reproduksi Kemiskinan Kota: studi Kasus di Empat Rusunawa Jakarta. In *Urban and Sustainable Report*. Jakarta: Indonesia Development and Islamic Studies.
- Iqbal, M., & Vonika, N. (2019). Dinamika Proses Relokasi di DKI Jakarta Studi Kasus: Kampung Akuarium Di Penjaringan, Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan*, 1(1), 32–52.
- Irawaty, D. T. (2018). Jakarta's Kampungs: Their History and Contested Future. *UCLA Electronic Theses and Dissertations*.
- Kurniawan, K. R. ... Nuraeny, E. (2020). Pulo Mas: Jakarta's failed housing experiment for the masses. *Planning Perspectives*, 0(0), 1–24.
<https://doi.org/10.1080/02665433.2020.1746192>
- Kusnandar, V. B. (2019). 445 RW di DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh. *Katadata.Co.Id*.
- Kusno, A. (2012). Housing The Margin: Perumahan Rakyat and The Future Urban Form of Jakarta. *Cornell University Southeast Asia Program*, 94, 23–56.
- Kusno, A. (2015). Power and time turning: The capital, the state and the kampung in Jakarta. *International Journal of Urban Sciences*, 19(1), 53–63.
<https://doi.org/10.1080/12265934.2014.992938>
- Media Jaya. (2020). *Tonggak Baru Penataan Kampung Berbasis Komunitas*.
- Prio Sambodo, Rizki Fillaili, R. J. S. (2012). *Mengintegrasikan Aspek Spasial Kemiskinan ke dalam Perencanaan Spasial Perkotaan: Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan Perkotaan*. 2010(1).
- Republika.co.id. (2016). *Pelibatan TNI tidak proporsional*.
- Rizzo, E. (2018). Women ' s Resistance and Resilience in Post Eviction in North Jakarta. *The Global Campus Awarded Theses of the Academic 2017/2018*.
- Rukmana, D. (2018). Upgrading Housing Settlement for the Urban Poor in Indonesia: An Analysis of the Kampung Deret Program. *Springer*.
- Savirani, A., & Aspinall, E. (2017). Adversarial linkages: The urban poor and electoral politics in Jakarta. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36(3), 3–34.
<https://doi.org/10.1177/186810341703600301>
- Soegiarto, K. A. (1987). Menelusuri Tonggak-

- Tonggak Sejarah Puslitbang Oseanologi-Lipi. *Oseana*, XII(3), 1–52.
- Sutanudjaja, E. (2020). Kampung Akuarium dan Masa Depan Perumahan Rakyat. *Rujak.Org*.
- Sutanudjaja, E. ... Pusat, J. (2019). *Kampung Kota & Representasinya: Kumpulan Seri Diskusi Hak atas Hunian Layak*. Rujak Center For Urban Studies.
- Tauchid, N. A. ... Indonesia, U. (2015). *Penyelesaian Konflik Lahan antara Pemda DKI Jakarta dengan Warga: Pendekatan*. 23–38.
- Texier, P. (2008). Floods in Jakarta: When the extreme reveals daily structural constraints and mismanagement. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 17(3), 358–372. <https://doi.org/10.1108/09653560810887284>
- UN Habitat. (2003). *GLOBAL REPORT ON HUMAN SETTLEMENTS 2003: THE CHALLENGE OF SLUMS*.
- Van Voorst, R., & Hellman, J. (2015). One Risk Replaces Another. *Asian Journal of Social Science*, 43(6), 786–810. <https://doi.org/10.1163/15685314-04306007>
- Yustiara, D. (2018). *LANDED TO VERTICAL : RUMAH SUSUN KAMPUNG AKUARIUM*. Insitut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Yustiara, D., & Nirwansyah, R. (2018). Pendekatan Behavior Setting pada Penataan Lingkungan Kampung Akuarium dalam Desain Rumah Susun. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 7(2), 76–79.

